



Targetkan Tambah Tempat Tidur Critical

■ Pemkot Hindari Antrean Pasien Corona di RS

Kita target Januari ini bisa sampai 25 (bed). Nah, sekarang masih 24, kurang satu lagi.

Heroe Poerwadi
Wawali Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus berupaya melakukan penambahan bed, atau tempat perawatan pasien Covid-19. Sesuai target, pada Januari ini, setidaknya bisa bertambah menjadi 25 bed.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, penambahan ini difokuskan pada *critical bed* atau tempat tidur pasien kritis ICU, sekaligus ventilator. Hal tersebut dilakukan, untuk menghindari antrean pasien.

Heroe pun mengungkapkan, dari tujuh rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayahnya, sebelumnya tersedia 23 *critical bed* ICU. Menurutnya, upaya penambah-

an tersebut, sejauh ini membuahkan hasil, meski belum sepenuhnya.

"Sudah sebenarnya, hanya yang ICU ventilator itu kan kita target Januari ini bisa sampai 25. Nah, sekarang masih 24 (bed), kurang satu lagi," terangnya, Jumat (29/1).

Wakil Wali Kota Yogyakarta itu berujar, penambahan akan menyasar RSUD Kota Yogyakarta, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk rumah sakit rujukan lainnya. "Nanti kita upayakan yang masih kurang. Memang, sampai sekarang, kita belum mendapatkan laporan kekurangan untuk yang ventilator itu," tandas Heroe.

Sebelumnya, ia sempat menyinggung potensi antrean kamar perawatan karena keterbatasan *critical bed* ICU. Oleh sebab itu, Pemkot Yogyakarta pun harus cepat merespon potensi tersebut, dengan berupaya menambah fasilitas.

"Keterisian ICU kan terutama untuk pasien positif dengan komorbid. Jadi, lamanya perawatan tergantung komorbidnya, karena ada kompleksitas tersendiri. Kalau untuk Covid-19-nya itu hanya 14 hari," pungkasnya.

• ke halaman 15

Targetkan Tambah

• Sambungan Hal 9

Belum sajikan data

Hingga saat ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY belum bisa menyajikan data ketersediaan tempat tidur di 27 RS rujukan Covid-19 dalam laporan hariannya. Kendati demikian, untuk memperoleh data ketersediaan, masyarakat bisa mengakses Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap) yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, menjelaskan, Siranap bisa diakses melalui jaringan internet. Di dalamnya tersaji data ketersediaan tempat tidur di seluruh fasilitas layanan kesehatan yang terdaftar.

"Jadi RS memberikan data jumlah rawat inap rawat jalan tempat tidur. Siranap mengeluarkan (data) agar

masyarakat bisa tahu berapa tempat tidur yang disediakan," jelas Pembajun di Bangsal Kepatihan, Jumat (29/1).

Pembajun menjelaskan, Siranap bisa memaparkan ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 maupun pasien umum. Namun, sejumlah masalah masih ditemui. Sebab, tak seluruh RS memiliki kedisiplinan dalam memasukkan data.

"Nah jadi bisa dibayangkan RS punya beberapa aplikasi, yang bisa diakses masyarakat adalah Siranap. Semua RS harusnya memasukkan data. Masalahnya kedisiplinan RS yang memasukkan data itu berbeda-beda," tandasnya.

Menurut Pembajun, tiap rumah sakit sejatinya harus disiplin dalam menginput data. Hal itu juga berpengaruh pada masalah administrasi. Misalnya dalam hal pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan. "Misalnya

kalau di satu RS hari ini bilang ada 10 pasien tapi tidak dimasukkan ke RS online, BPJS akan lihat. Loh bilang-nya 10 tapi klaimnya kok 12 pasien," urainya.

"Kita semua perlu evaluasi, misalnya lampiran BPJS harus selalu dilengkapi, biar tidak terjadi disrupt klaim," sambungnya.

Pembajun melanjutkan, untuk memperkuat sistem informasi di kancan lokal, Dinkes DIY tengah berupaya mematangkan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Sistem informasi tersebut memiliki fungsi yang sama dengan Siranap milik Kemenkes RI. Dia menjelaskan, SPGDT adalah sistem informasi pelayanan kesehatan yang nantinya akan bisa diakses masyarakat.

Beberapa tahun lalu SPGDT pernah dipakai dalam rangka transfer atau mengirim pasien dengan kondisi

gawat darurat. "SPGDT itu sebenarnya aplikasi murni miliknya DIY. SPGDT adalah Sistem penanggulangan gawat darurat dan bencana. Jadi meliputi pelayanan kesehatan mulai dari pra rumah sakit sampai antar rumah sakit itu sendiri," bebarnya.

Namun di tahap awal, hanya segelintir kalangan yang bisa mengakses SPGDT. Salah satunya adalah Puskesmas. Harapannya Puskesmas tak mengalami kesulitan untuk merujuk jika pasien yang berobat membutuhkan penanganan yang lebih intensif.

Hingga saat ini Dinkes DIY belum menentukan target terkait kapan SPGDT dapat diakses oleh publik. "SPGDT memang belum kita buka ke masyarakat tapi kita coba dulu sebenarnya mendisiplinkan RS kan. Nanti pada saatnya akan dibuka untuk umum," tandasnya. (aka/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005